

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Biro Humas, Protokol dan Umum

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk Biro Humas, Protokol dan Umum berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tugas pokok, Fungsi Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Tugas Pokok Biro Humas, Protokol dan Umum yaitu :

- a. Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum Humas, Protokol dan Umum;
- b. Membantu Asisten Administrasi melakukan koordinasi, pembinaan dan pengendalian, pengembangan kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah Provinsi di Bidang Humas, Protokol dan Umum meliputi aspek Hubungan Masyarakat, Protokol, Tata Usaha, Kepegawaian, Rumah Tangga serta Administrasi Keuangan sekretaris Daerah.

Peran Biro Humas, Protokol dan Umum sangat strategis dalam akselerasi pencapaian Visi pemerintah Provinsi Jawa Barat, namun demikian diperlukan adanya pemantapan kinerja aparatur di lingkungan Biro Humas, Protokol dan Umum dengan meningkatkan fungsi koordinasi dan sinergitas program kegiatan, sehingga harapan arah dan langkah dari organisasi ini akan lebih mudah dalam mencapai tujuan dan sasaran serta upaya menempatkan posisi pelayanan untuk membangun *performance* Jawa Barat.

1.2 Latar Belakang

Biro Humas, protokol dan Umum sebagai Lembaga Teknis Daerah yang kedudukannya sebagai Pejabat Pemerintah Provinsi yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah adalah salah satu diantara Instansi Pemerintah Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 dituntut untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan salah satu laporan pertanggungjawaban berbasis pada pengukuran kinerja dari program kegiatan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun berjalan.

Tuntutan adanya pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, merupakan salah satu pertimbangan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan negara mulai dari Pejabat Eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategik yang dirumuskan sebelumnya. Pertanggungjawaban dimaksud (1) disampaikan kepada atasan masing-masing, kepala lembaga-lembaga pengawasan dan penilaian akuntabilitas yang berkewenangan dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala

Pemerintahan, serta (2) dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Humas, Protokol dan Umum adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Laporan Penetapan kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Transisi Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2009;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat.
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.4 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yaitu untuk mengetahui :

1. Memberikan informasi kinerja yg terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
2. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan suatu Instansi

3. Mengukur tingkat pencapaian sasaran berdasarkan satuan anggaran sudah yang ditetapkan dalam penetapan kinerja
4. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Intansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan umum (*strategic issue*) yang sedang dihadapi oleh organisasi tersebut..

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diuraikan tentang ringkasan / ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Terdiri dari sub bab yaitu :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada Subbab ini di uraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2013 – 2018

Memperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025, Pemerintah dan masyarakat Jawa Barat telah menetapkan visi, yaitu : *"Dengan Iman dan Taqwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia"*, yang akan diwujudkan melalui lima misi Pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu dan teknologi, produktif dan berdaya saing;
2. Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah;
3. Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Visi untuk Tahun 2013 – 2018 yaitu: *"Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua"*, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 yang akan diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan, yaitu:

1. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan;
3. Meningkatkan kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan perluasan partisipasi publik;
4. Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dan Pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan;
5. Meningkatkan kehidupan sosial, seni dan budaya, peran pemuda dan olah raga serta pengembangan Pariwisata dalam bingkai kearifan lokal.

2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Biro Humas, Protokol dan Umum berdasarkan Peraturan Gubernur No 11 Tahun 2015 tentang tugas pokok, fungsi, rincian tugas yaitu, menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum humas, protokol, dan umum, membantu Asisten Administrasi melakukan koordinasi, pembinaan dan pengendalian, pengembangan kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi, serta fasilitasi, pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang humas, protokol dan umum meliputi aspek hubungan masyarakat, protokol, tata usaha, dan kepegawaian, rumah tangga serta Administrasi Keuangan Sekretaris Daerah.

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut, Biro Humas, Protokol dan Umum mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan umum, serta koordinasi, pembinaan, dan pengendalian bidang humas protokol dan umum;
2. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan pengendalian serta dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang hubungan masyarakat, protokol dan umum;
3. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang hubungan masyarakat, protokol dan umum;

Adapun rincian tugas Biro Humas, Protokol dan Umum adalah sebagai berikut:

1. Menyenggarakan perumusan program kerja Biro Humas, Protokol dan Umum;
2. Menyenggarakan perumusan bahan kebijakan umum bidang hubungan masyarakat, protokol dan umum meliputi aspek hubungan masyarakat, protokol, tata usaha dan kepegawaian, rumah tangga serta administrasi keuangan Sekretariat Daerah;
3. Membantu Asisten Administrasi menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian, serta fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintah Daerah Provinsi bidang hubungan masyarakat, protokol dan umum;
4. Membantu Asisten Administrasi mengembangkan kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi bidang hubungan masyarakat, protokol dan umum;
5. Menyenggarakan ketatausahaan Biro meliputi kepegawaian, administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan Biro, keuangan dan pelayanan informasi lingkup Biro;
6. Menyenggarakan perumusan bahan melaksanakan perumusan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, Tapkin, LAKIP, LKPJ, dan LPPD lingkup Biro;
7. Menyenggarakan pengelolaan administrasi keuangan Sekretariat Daerah;
8. Menyenggarakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang humas protokol dan umum;
9. Menyenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
10. Menyenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Biro Humas, Protokol dan Umum;
11. Menyenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.3 Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana dan bagaimana suatu pemerintahan harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat exsis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu pemerintahan. Pada hakekatnya visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan.

Dalam upaya mewujudkan peningkatan mutu pelayanan kerja koordinasi pembangunan di Jawa Barat, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dengan jelas, maka Biro Humas, Protokol dan Umum tahun 2013 – 2018 mempunyai Visi sebagai berikut :

“Penyelenggaraan Pelayanan Prima Kepada Pimpinan, Aparatur dan Masyarakat”

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan ditempuh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan visi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi pada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Visi dan Misi akan mendorong alokasi sumber daya diseluruh organisasi, sehingga kedua ungkapan tersebut harus selaras dengan tugas, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan organisasi pemerintah.

Untuk mewujudkan visi menunjang terwujudnya pelayanan prima, maka ditetapkan misi Biro Humas, Protokol dan Umum sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Ketatausahaan, Kepegawaian dan Keprotokolan secara tertib Administrasi dan tertib penyelenggaraan Jadwal acara Pimpinan
2. Menyelenggarakan Pelayanan Prima Kerumahtanggaan Kepada Pimpinan dan Aparatur Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Menyelenggarakan Kehumasan yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel
4. Menyelenggarakan layanan Sandi dan Telekomunikasi secara cepat dan tepat dengan menggunakan teknologi komunikasi modern.

2.4 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang telah spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Dengan menagacu pada visi dan misi Biro Humas, Protokol dan Umum serta didasarkan pada isu-isu strategik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2013-2018, maka tujuan Biro Humas, Protokol dan Umum sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan ketatausahaan, kepegawaian dan keprotokolan dan meningkatkan tertib administrasi dan tertib penyelenggaraan jadwal acara Pimpinan.
2. Meningkatkan Pelayanan kepada Pimpinan dan Aparatur Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

3. Meningkatkan Pelaksanaan Kehumasan dengan cepat, tepat, transparan dan akuntabel agar dapat diterima oleh lingkungan masyarakat Jawa Barat dan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Meningkatkan pelayanan sandi dan telekomunikasi secara cepat dan menyebarkan informasi secara luas dengan Teknologi Komunikasi Modern.

2.5 Sasaran dan Kebijakan

2.5.1 Sasaran

Memperhatikan visi dan misi Biro Humas, Protokol dan Umum, peningkatan capaian kinerja dengan indikator kinerja yaitu : *persentase pelayanan kesehatan Pegawai dan Fasilitas Olahraga Pegawai; persentase PNS yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan Teknis; persentase berita di media massa yang termonitor, persentase program dan kebijakan Provinsi Jawa Barat yang tersosialisasi melalui media massa (cetak, elektronik dan luar ruangan); terselenggaranya pelayanan informasi daerah; terselenggaranya Pesta Rakyat dalam rangka Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016; Bertambahnya koleksi dan jumlah buku; persentase pemenuhan pelayanan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Daerah secara tepat waktu, persentase pelayanan penatausahaan atau administrasi keuangan daerah yang tepat waktu, persentase laporan keuangan daerah Sekretariat Daerah yang tepat waktu, opini hasil audit BPK atas laporan keuangan Setda.*

Maka Biro Humas, Protokol dan Umum menetapkan sasaran yang ingin di capai sebagai berikut:

1. Meningkatnya Ketatausahaan, Kepegawaian dan Keprotolan secara tertib administrasi dan tertib penyelenggaraan jadwal acara Pimpinan.
2. Meningkatnya pelayanan prima Kerumah tanggaan kepada Pimpinan dan Aparatur Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Meningkatnya kehumasan yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel.
4. Menyelenggarakan layanan Sandi dan Telekomunikasi secara cepat dan tepat dengan menggunakan teknologi komunikasi modern.

2.5.2 Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi pemerintah.

Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dipertegas tentang upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui kebijakan Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun dari 2013 – 2018. Kebijakan ini penting untuk memberikan arah dan koridor yang hendak dilakukan agar Misi yang telah ditetapkan dapat direalisasikan dengan tepat. Adapun arah kebijakan Biro Humas, Protokol dan Umum Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 2013 – 2018, sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kearsipan untuk menunjang kegiatan Pimpinan.
2. Memberikan pelayanan untuk berbagai kegiatan Pimpinan dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan
3. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Kesehatan, Sarana Olahraga, Kerohanian dan Kesenian
4. Memelihara kantor dan rumah tangga
5. Meningkatkan Pelayanan Kedinasan Pimpinan
6. Memberikan fasilitas untuk pelaksanaan tugas Pimpinan Aparatur Setda
7. Membuat Berbagai Laporan Kegiatan yang Sudah Dilaksanakan dan Perubahan Anggaran yang akan direncanakan untuk tahun berikutnya
8. Memberikan Pelayanan Melalui Berbagai Media Dalam Pelaksanaan Pembangunan Pemerintahan

2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan Instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program / Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam rangkamewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Gubernur Jawa Barat) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Biro Humas, Protokol dan Umum dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Biro Humas, Protokol Dan Umum
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya jaminan Kesejahteraan bagi Aparatur Pemerintah Daerah	Persentase Pelayanan kesehatan Pegawai dan Fasilitas Olahraga Pegawai	100%
2	Meningkatnya jaminan Kesejahteraan Bagi Aparatur Pemerintah Daerah	Persentase PNS yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan Teknis	100%

3	Meningkatnya Pelayanan Informasi Kepada Masyarakat dan Stakeholder Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Berita di Media Massa yang Termonitor 2. Persentase Program dan Kebijakan Pemprov Jabar yang Tersosialisasi melalui Media Massa (cetak, elektronik dan luar ruangan) 	100%
4	Sinergitas dan Sinkronisasi Pelayanan Informasi Daerah	Terselenggaranya Pelayanan Informasi Daerah	100%
5	Meningkatnya peran serta masyarakat	Terselenggaranya Pesta Rakyat Dalam rangka Hari Jadi pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	100%
6	Meningkatnya Koleksi buku Perpustakaan	Bertambahnya Koleksi dan Jumlah Buku	100%
7	Terwujudnya pelayanan pengelolaan keuangan yang tepat waktu, akurat dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pemenuhan pelayanan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Daerah secara tepat waktu 2. Persentase pelayanan penatausahaan atau administrasi keuangan daerah yang tepat waktu 3. Persentase laporan keuangan Sekretariat Daerah yang disusun tepat waktu 4. Opini hasil audit BPK atas laporan keuangan Setda 	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp. 28.764.500.000,00	APBD
2.	Program Pengembangan Kompetensi Aparatur	Rp. 2.499.400.000,00	APBD
3.	Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur	Rp. 1.619.340.000,00	APBD
4.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 89.361.539.500,00	APBD
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 18.569.245.000,00	APBD
6.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 19.343.704.000,00	APBD
7.	Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	Rp. 1.599.199.000,00	APBD
8.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 100.000.000,00	APBD
9.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rp. 430.000.000,00	APBD
JUMLAH		Rp. 162.286.927.500,00	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban Biro Humas, Protokol dan Umum untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksana program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi daerah secara terukur sesuai dengan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas kinerja, dimaksudkan memberikan gambaran mengenai akuntabilitas tingkat pencapaian kinerja sasaran, program / kegiatan serta indicator kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Biro Humas, Protokol dan Umum Tahun 2013 – 2018.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sasaran strategik Biro Humas, Protokol dan Umum dilaksanakan dengan membandingkan indicator kinerja sasaran yang bersifat *outcome* dan *output* penting realisasi kinerja actual tahun 2016 dengan targetnya sehingga diperoleh capaian kinerja dalam bentuk presentase.

Selain itu pengukuran kinerja mencakup pula beberapa capaian kinerja yang dapat diperbandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, *benchmarking* dan perbandingan kinerja actual dengan standarnya atau standar pelayanan minimal (SPM) serta perbandingan kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan Rencana Jangka Menengah (RPJMD). Data kinerja actual diperoleh dari sumber data primer maupun sekunder melalui sistem informasi pengumpulan data kinerja.

Pengukuran kinerja sebagai dukungan pencapaian sasaran meliputi:

5. Tingkat pencapaian sasaran instansi Pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Rencana Kinerja,
6. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.

Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

% Pencapaian Target	=	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}}$	x	100%
----------------------------	----------	---	----------	-------------

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

% *Pencapaian Target* = $\frac{Rencana-(Realisasi-Rencana)}{Rencana} \times 100\%$

Selanjutnya, pemaknaan dari capaian nilai kinerja dibagi berdasarkan klasifikasi berikut:

Tabel 3.1
Skala Penilaian

SKALA NILAI	KATEGORI PENILAIAN
>100	Sangat Baik
80 > 100	Baik
>55 – 80	Sedang
<55	Kurang

3.1.2 Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015

Berdasarkan Rencana Strategis Biro Humas, Protokol dan Umum, terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis yang diukur melalui 11 indikator. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan sebagai realisasinya.

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Biro Humas, Protokol dan Umum sebagaimana yang telah ditetapkan, diuraikan berdasarkan indicator sasaran pada masing – masing tujuan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya jaminan Kesejahteraan bagi Aparatur Pemerintah Daerah	Persentase Pelayanan kesehatan Pegawai dan Fasilitas Olahraga Pegawai	Persen	100%	100%	100%
2	Meningkatnya jaminan Kesejahteraan Bagi Aparatur Pemerintah Daerah	Persentase PNS yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Persen	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Pelayanan Informasi Kepada Masyarakat dan Stakeholder Pembangunan	3. Persentase Berita di Media Massa yang Termonitor 4. Persentase Program dan	Persen Persen	100% 100%	100% 100%	100% 100%

		Kebijakan Pemprov Jabar yang Tersosialisasi melalui Media Massa (cetak, elektronik dan luar ruangan)				
4	Sinergitas dan Sinkronisasi Pelayanan Informasi Daerah	Terselenggaranya Pelayanan Informasi Daerah	Persen	100%	100%	100%
5	Meningkatnya peran serta masyarakat	Terselenggaranya Pesta Rakyat Dalam rangka Hari Jadi pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	Persen	100%	100%	100%
6	Meningkatnya Koleksi buku Perpustakaan	Bertambahnya Koleksi dan Jumlah Buku	Persen	100%	100%	100%
7	Terwujudnya pelayanan pengelolaan keuangan yang tepat waktu, akurat dan akuntabel	5. Persentase pemenuhan pelayanan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Daerah secara tepat waktu 6. Persentase pelayanan peñata usahaan atau administrasi keuangan daerah yang tepat waktu 7. Persentase laporan keuangan Sekretariat Daerah yang disusun tepat waktu 8. Opini hasil audit BPK atas laporan keuangan Setda	Persen Persen Persen	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
RATA – RATA						100%

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Biro Humas, Protokol dan Umum tahun 2016 adalah 100% (BAIK), yang dihitung berdasarkan presentase rata – rata capaian sasaran. Dari 7 sasaran semuanya sasaran capaiannya BAIK, sasaran dinyatakan “BAIK” jika capaiannya 80 > 100 dari target yang telah ditetapkan. Semua sasaran dan indicator kinerja sesuai dengan target yaitu 100%

3.1.3 Perbandingan dan Target Realisasi Indikator Kinerja

Berdasarkan hasil pendataan terhadap kinerja sasaran stratejik diperoleh data kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja
Tahun 2015 – 2016

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PERCEPATAN (PERLAMBATAN) (%)
		2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Sasaran : Meningkatkan jaminan Kesejahteraan bagi Aparatur Pemerintah Daerah				
Persentase Pelayanan kesehatan Pegawai dan Fasilitas Olahraga Pegawai	Persen	100%	100%	-
2. Sasaran : Meningkatkan jaminan Kesejahteraan Bagi Aparatur Pemerintah Daerah				
Persentase PNS yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Persen	100%	100%	-
3. Sasaran : Meningkatkan Pelayanan Informasi Kepada Masyarakat dan Stakeholder Pembangunan				
a. Persentase Berita di Media Massa yang Termonitor	Persen	100%	100%	-
b. Persentase Program dan Kebijakan Pemprov Jabar yang Tersosialisasi melalui Media Massa (cetak, elektronik dan luar ruangan)	Persen	100%	100%	-
4. Sasaran : Sinergitas dan Sinkronisasi Pelayanan Informasi Daerah				
Terselenggaranya Pelayanan Informasi Daerah	Persen	100%	100%	-
5. Sasaran : Meningkatkan peran serta masyarakat				
Terselenggaranya Pesta Rakyat Dalam rangka Hari Jadi pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	Persen	100%	100%	-
6. Sasaran : Meningkatkan Koleksi buku Perpustakaan				
Bertambahnya Koleksi dan Jumlah Buku	Persen	100%	100%	-
7. Sasaran : Terwujudnya pelayanan pengelolaan keuangan yang tepat waktu, akurat dan akuntabel				
a. Persentase pemenuhan pelayanan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Daerah secara tepat waktu	Persen	100%	100%	-
b. Persentase pelayanan peñata usahaan atau administrasi keuangan daerah yang tepat waktu	Persen	100%	100%	-
c. Persentase laporan keuangan Sekretariat Daerah yang disusun tepat waktu	Persen	100%	100%	-
d. Opini hasil audit BPK atas laporan keuangan Setda	Persen	100%	100%	-

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut, terlihat capaian kinerja Biro Humas, Protokol dan Umum tidak mengalami percepatan ataupun perlambatan capaian kinerja dari capaian tahun 2015.

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Biro Humas, Protokol dan Umum dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMD
2013 – 2018

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN				TARGET 2018	CAPAIAN TARGET TERHADAP REALISASI RPJMD TAHUN 2016
		2013	2014	2015	2016		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Sasaran : Meningkatnya jaminan Kesejahteraan bagi Aparatur Pemerintah Daerah							
Persentase Pelayanan kesehatan Pegawai dan Fasilitas Olahraga Pegawai	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2. Sasaran : Meningkatnya jaminan Kesejahteraan Bagi Aparatur Pemerintah Daerah							
Persentase PNS yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3. Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Informasi Kepada Masyarakat dan Stakeholder Pembangunan							
a. Persentase Berita di Media Massa yang Termonitor	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
b. Persentase Program dan Kebijakan Pemprov Jabar yang Tersosialisasi melalui Media Massa (cetak, elektronik dan luar ruangan)	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4. Sasaran : Sinergitas dan Sinkronisasi Pelayanan Informasi Daerah							
Terselenggaranya Pelayanan Informasi Daerah	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5. Sasaran : Meningkatnya peran serta masyarakat							

Terselenggaranya Pesta Rakyat Dalam rangka Hari Jadi pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6. Sasaran : Meningkatnya Koleksi buku Perpustakaan							
Bertambahnya Koleksi dan Jumlah Buku	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7. Sasaran : Terwujudnya pelayanan pengelolaan keuangan yang tepat waktu, akurat dan akuntabel							
a. Persentase pemenuhan pelayanan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Daerah secara tepat waktu	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
b. Persentase pelayanan peñata usahaan atau administrasi keuangan daerah yang tepat waktu	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
c. Persentase laporan keuangan Sekretariat Daerah yang disusun tepat waktu	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
d. Opini hasil audit BPK atas laporan keuangan Setda	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2 Hasil Pengukuran Indikator Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja, secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Biro Humas, Protokol dan Umum tahun 2016 adalah 100% (BAIK) sama seperti capaian kinerja pada tahun 2016.

1. Sasaran pertama Meningkatnya jaminan Kesejahteraan bagi Aparatur Pemerintah Daerah memiliki indicator kinerja Persentase Pelayanan kesehatan Pegawai dan Fasilitas Olahraga Pegawai setiap tahunnya Biro Humas, Protokol dan Umum memiliki target capaian kinerja sebesar 100% dan dapat terealisasi 100% sesuai target. Pelayanan kesehatan Pegawai dan Fasilitas Olahraga Pegawai dapat terselenggara 100% karena terpenuhinya peralatan / perlengkapan olah raga untuk kegiatan olah raga di lingkungan Setda dan terpenuhinya kesehatan bagi karyawan Setda seperti medical check up dan obat – obatan poliklinik.
2. Sasaran kedua Meningkatnya Jaminan Kesejahteraan Bagi Aparatur Pemerintah Daerah memiliki indicator kinerja Persentase PNS yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan Teknis memiliki target 100% dan dapat terealisasi sesuai target yaitu 100%. Diperuntukan untuk semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Setda untuk mengembangkan birokrasi yang semakin professional dan akuntabel dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan ditunjang sarana administrasi kepegawaian untuk menghasilkan kinerja dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil Setda yang semakin meningkat.
3. Sasaran ketiga Meningkatnya Pelayanan Informasi Kepada Masyarakat dan Stakeholder Pembangunan memiliki dua (2) indicator kinerja:
 - a. Persentase Berita di Media Massa yang Termonitor memiliki target 100% dapat terealisasi sesuai target yaitu 100%, diperuntukan untuk masyarakat pembaca harian umum, masyarakat penonton televisi, masyarakat umum di tempat tertentu. Capaian indicator ini bertujuan mempublikasikan kebijakan, program dan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tersosialisasikannya dan terselenggaranya publikasi kebijakan, program dan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui media cetak, radio, televisi, online dan media luar ruang.
 - b. Persentase Program dan Kebijakan Pemprov Jabar yang Tersosialisasi melalui Media Massa (cetak, elektronik dan luar ruangan) memiliki target 100% dapat terealisasi sesuai target yaitu 100%, diperuntukan untuk pers, pimpinan dan OPD Provinsi, jurnalistik. Capaian bertujuan meningkatkan dan dapat terselenggaranya monitoring dan evaluasi tentang pemberitaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4. Sasaran Keempat Sinergitas dan Sinkronisasi Pelayanan Informasi Daerah memiliki indicator kinerja Terselenggaranya Pelayanan Informasi Daerah memiliki target 100% dapat direalisasi sesuai target yaitu 100%, diperuntukan untuk tamu Negara/kehormatan serta media Humas, OPD Provinsi, Kab/Kota, lingkungan Gedung Sate dan Pimpinan, masyarakat umum untuk meningkatkan fasilitas pelayanan daerah.
5. Sasaran Kelima Meningkatnya peran serta masyarakat memiliki indicator kinerja Terselenggaranya Pesta Rakyat Dalam rangka Hari Jadi pemerintah Provinsi Jawa Barat

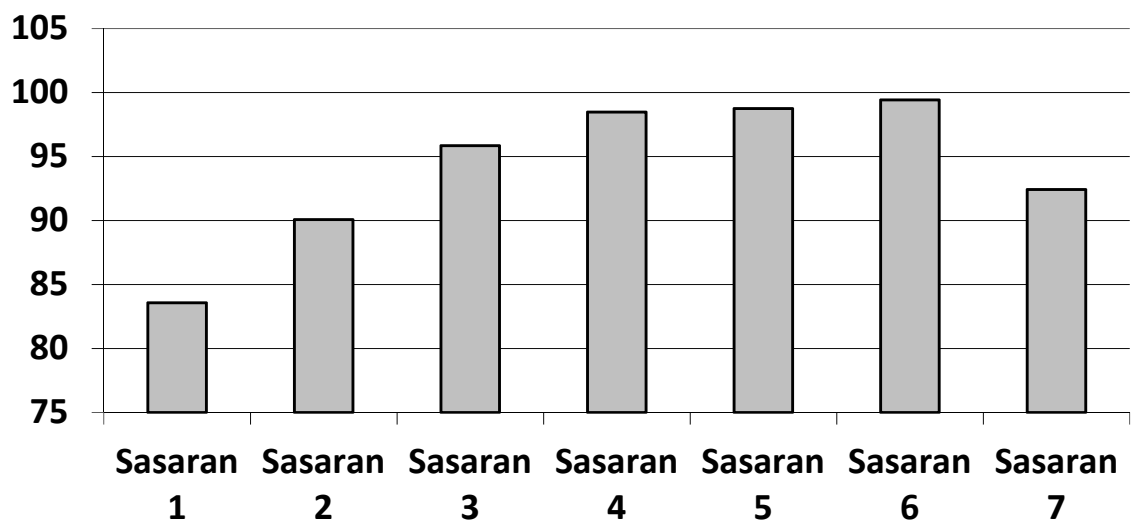
Tahun 2016 memiliki target 100% dapat direalisasikan sesuai target yaitu 100% diperuntukan untuk masyarakat umum, agar dapat terselenggara Hari Jadi Jawa Barat.

6. Sasaran Keenam Meningkatnya Koleksi buku Perpustakaan memiliki indicator kinerja Bertambahnya Koleksi dan Jumlah Buku memiliki target 100% dapat direalisasikan sesuai target yaitu 100% diperuntukan untuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Setda untuk meningkatkan minat baca pegawai di lingkungan Setda.
7. Sasaran Ketujuh Terwujudnya pelayanan pengelolaan keuangan yang tepat waktu, akurat dan akuntabel memiliki indicator kinerja :
 - a. Persentase pemenuhan pelayanan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Daerah secara tepat waktu memiliki target 100% dapat direalisasikan sesuai target yaitu 100%, diperuntukan semua Biro – biro di lingkungan Setda dan ditargetkan untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran mencapai 100% dengan memfasilitasi dan koordinasi penyusunan RKA, DPA Setda TA 2017 dan Pergesaran, Perubahan DPA Setda TA 2017.
 - b. Persentase pelayanan penata usahaan atau administrasi keuangan daerah yang tepat waktu memiliki target 100% dapat direalisasikan sesuai target yaitu 100%, diperuntukan semua Biro – biro di lingkungan Setda dan ditargetkan untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran mencapai 100% dengan memfasilitasi dan mengkoordinasikan penatausahaan Keuangan Setda.
 - c. Persentase laporan keuangan Sekretariat Daerah yang disusun tepat waktu memiliki target 100% dapat direalisasikan sesuai target yaitu 100%, diperuntukan semua Biro – biro di lingkungan Setda memiliki capaian target terwujudnya sinergitas dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan Setda dan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dengan menyusun data mutasi asset, menyusun laporan realisasi bulanan, triwulanan dan semesteran TA 2016, menyusun berita acara Rekonsiliasi Realisasi APBD Triwulan IV TA 2015 & Triwulan I, Semester I, Triwulan III TA 2016, menyusun aplikasi Pelayanan Administrasi Keuangan.
 - d. Opini hasil audit BPK atas laporan keuangan Setda memiliki target 100% dapat direalisasikan sesuai target yaitu 100%, diperuntukan semua Biro – biro di lingkungan Setda memiliki capaian target terwujudnya sinergitas dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan Setda dan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dengan menyusun Buku Aset Setda TA 2015 unreviewed, reviewed dan audited, menyusun Laporan Keuangan Setda TA 2015, unreviewed, reviewed dan audited, menyusun laporan Keuangan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah TA 2015, unreviewed, reviewed dan audited.

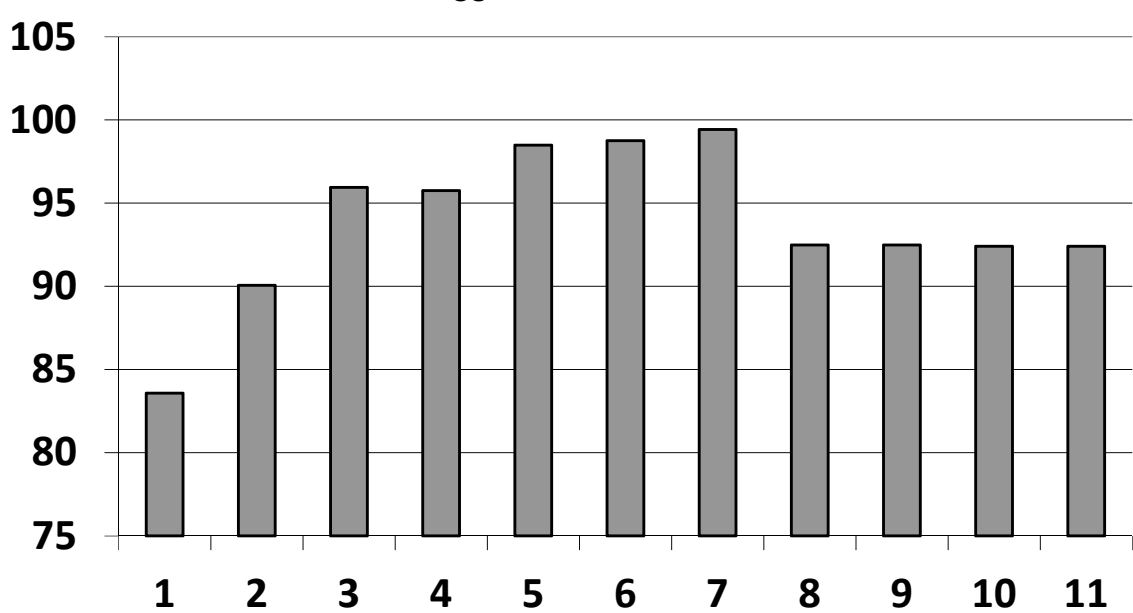
3.2 Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2016, Biro Humas, Protokol dan Umum melaksanakan sembilan (9) program, tujuh (7) sasaran dan 11 indikator kinerja dengan realisasi keuangan sebesar 93.80%. Mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, kinerja anggaran ini termasuk kategori TINGGI, kinerja anggaran tersebut tercapai dengan dukungan kinerja anggaran yang berkisar dari 83.58% - 99.43%. Realisasi anggaran tertinggi adalah sebesar 99.43% pada Sasaran Meningkatnya Koleksi Buku Perpustakaan dan realisasi anggaran terendah adalah sebesar 83.58% pada Sasaran Meningkatnya jaminan Kesejahteraan bagi Aparatur Pemerintah Daerah.

Grafik 3.1
Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis



Grafik 3.2
Realisasi Anggaran Per Indikator Sasaran



Tabel 3.5
Realisasi Kinerja dan Anggaran

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA			NAMA PROGRAM	KEUANGAN		
			TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIA N (%)
1	Meningkatnya jaminan Kesejahteraan bagi Aparatur Pemerintah Daerah	Persentase Pelayanan kesehatan Pegawai dan Fasilitas Olahraga Pegawai	100%	100%	100%	Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur	Rp 1.506.190.00 0	Rp 1.258.896.42 4	83.58%
2	Meningkatnya jaminan Kesejahteraan Bagi Aparatur Pemerintah Daerah	Persentase PNS yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan Teknis	100%	100%	100%	Pengembangan Kompetensi Aparatur	Rp 2.586.750.00 0	Rp 2.329.836.75 0	90.07%
3	Meningkatnya Pelayanan Informasi Kepada Masyarakat dan Stakeholder Pembangunan	1. Persentase Berita di Media Massa yang Termonitor	100%	100%	100%	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp 2.162.300.00 0	Rp 2.074.670.32 1	95.95%
		2. Persentase Program dan Kebijakan Pemprov Jabar yang Tersosialisasi melalui Media Massa (cetak, elektronik dan luar ruangan)	100%	100%	100%	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp 23.284.140.0 00	Rp 22.297.495.8 82	95.76%
4	Sinergitas dan Sinkronisasi Pelayanan Informasi Daerah	Terselenggaranya Pelayanan Informasi Daerah	100%	100%	100%	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.929.200.00 0	Rp 1.899.902.84 4	98.48%
5	Meningkatnya peran serta masyarakat	Terselenggaranya Pesta Rakyat Dalam rangka Hari Jadi pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	100%	100%	100%	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan	Rp 1.900.000.00 0	Rp 1.876.438.25 0	98.76%

						Teknologi Informasi			
6	Meningkatnya Koleksi buku Perpustakaan	Bertambahnya Koleksi dan Jumlah Buku	100%	100%	100%	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rp 430.000.000	Rp 427.559.650	99.43%
7	Terwujudnya pelayanan pengelolaan keuangan yang tepat waktu, akurat dan akuntabel	1. Persentase pemenuhan pelayanan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Daerah secara tepat waktu	100%	100%	100%	Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	Rp 799.462.000	Rp 739.379.134	92.48%
		2. Persentase pelayanan penatausahaan atau administrasi keuangan daerah yang tepat waktu	100%	100%	100%				
		3. Persentase laporan keuangan Sekretariat Daerah yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	Rp 799.657.000	Rp 738.941.908	92.41%
		4. Opini hasil audit BPK atas laporan keuangan Setda	100%	100%	100%	Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	Rp 0	Rp 0	-

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan Umum

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Biro Humas, Protokol dan Umum dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada tiap – tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dikategorikan BAIK. Berdasarkan uraian capaian kinerja yang merupakan capaian sasaran pada setiap tujuan Misi dan Visi Biro Humas, Protokol dan Umum maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan capaian kinerja sasaran sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Tingkat capaian kinerja Biro Humas, Protokol dan Umum tahun 2016 sebesar 100% (BAIK), yang dihitung berdasarkan presentase rata – rata capaian sasaran. Dari tujuh (7) sasaran semuanya memenuhi target yang telah ditetapkan.

4.2 Langkah Peningkatan Kinerja

Dilihat dari capaian sasaran strategis, terdapat efisiensi anggaran yang dilakukan hal ini terlihat dari capaian indikator yang sesuai target. Di sisi lain, terdapat program / kegiatan yang perlu dikaji kembali efektifitasnya untuk mendukung capaian kinerja dan beberapa indikator masih perlu upaya mempertahankan ataupun peningkatan kinerja secara sistematis.

Rencana peningkatan kinerja Biro Humas, Protokol dan Umum untuk tahun mendatang perlu difokuskan pada tujuan organisasi dan sasaran strategis. Tujuan organisasi yang memerlukan upaya sistematis untuk mencapai target yang direncanakan adalah meningkatkan Pelayanan Prima Kepada Pimpinan, Aparatur dan Masyarakat.